



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10
Telp. 3351854 Palembang

NOTA DINAS

Yth. : 1. Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Perumahan;
3. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
4. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
5. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;
6. Kepala UPTD PIP2B & Jasa Konstruksi;
Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal : 09 Januari 2026
Nomor : 800/019/DPKP.I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Sehubungan dengan akan dimulainya Rancangan Awal (RKPD) Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027, maka bersama ini diminta kepada Kepala Bidang dan Kepala UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi agar dapat hadir untuk menyampaikan paparan terkait rincian Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027 (*Slide Paparan berupa Power Point* lengkap dengan rincian lokasi, *output dan outcome*) pada rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Jadwal Terlampir
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Besemah Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
Agenda : Paparan Usulan Kegiatan TA. 2027
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST, MM, IPM, ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751125 199903 1 004

JADWAL PAPARAN KEPALA BIDANG DAN KEPALA UPTD TERKAIT USULAN KEGIATAN TA 2027

No	Hari	Tanggal	Jam	Bidang	Tempat
1.	Senin	12 Januari 2026	08.00 - 11.00	Pengembangan Kawasan Permukiman	Ruang Rapat Besemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
			13.30 - 15.30	Perumahan	
2.	Selasa	13 Januari 2026	08.00 - 15.30	Penataan Bangunan dan Lingkungan	
				PIP2B dan Jasa Konstruksi	
				Sekretariat	
3.	Rabu	14 Januari 2026	08.00 - 11.00	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10

Telp. 3351854 Palembang

NOTULEN RAPAT

Pada hari Senin tanggal 12 bulan Januari tahun 2026 jam : 08.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Basemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

1. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Materi Rapat : Pembahasan Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027
3. Peserta Rapat :
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaaan
 - Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pelaksana Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Pelaksana Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Hasil / Kesimpulan Rapat :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Bidang PKP diminta untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan RPJMD Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.;
- RKP Bidang PKP yang telah ditetapkan agar terus dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga pelaksanaan kegiatan tetap on track dan sejalan dengan kebijakan pendukung RPJMD.
- Disampaikan bahwa Bidang PKP telah memiliki Sistem Digitalisasi Informasi Kawasan Kumuh (SiPerkum) yang saat ini diterapkan di Kabupaten Banyuasin. Namun terdapat kendala berupa data kawasan kumuh yang belum lengkap dari pemerintah kabupaten setempat.
- Disepakati perlunya sosialisasi SiPerkum kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menyinergikan sistem provinsi dan kabupaten, memperjelas pembagian kewenangan, serta mendorong kelengkapan data kawasan kumuh.
- SiPerkum diharapkan dapat diterapkan di wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
- Seluruh kegiatan pemugaran, peremajaan, dan penataan kembali kawasan kumuh, tanpa melihat sumber pendanaan, harus menghasilkan output berupa data yang terdokumentasi dengan baik.
- Dengan pagu anggaran sebesar Rp15 miliar, kegiatan penanganan kawasan kumuh agar dibagi secara proporsional ke beberapa kabupaten/kota. Dari sekitar 66 titik lokasi, minimal 30 titik ditindaklanjuti dengan prioritas daerah urbanisasi dan padat penduduk seperti Kota Palembang, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau.
- Seluruh kegiatan Bidang PKP wajib dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan kawasan, serta dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang menjadi wilayah kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bidang PKP diminta aktif melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi kegiatan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk dukungan pendanaan melalui BKBK apabila daerah mengalami keterbatasan anggaran.
- Ditekankan pentingnya percepatan dukungan program penanganan kawasan kumuh yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan yang dihapus pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi agar tetap dicatat dan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.
- Diminta untuk menyiapkan data laporan existing Tahun 2025 terkait CSR sebagai bahan Nota Dinas kepada Gubernur.
- Disepakati untuk membuat surat dukungan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada pemerintah kabupaten/kota serta BUMN, BUMD, dan Baznas yang memenuhi kriteria, dengan target percepatan pada bulan Februari.
- Bidang PKP diminta tetap konsisten dalam percepatan penyusunan dasar hukum RTLH existing yang direncanakan pada Tahun 2027.
- Administrasi terkait efisiensi anggaran harus disusun dengan cermat dan tidak terjadi tumpang tindih, khususnya pada kegiatan perjalanan dinas.
- Laporan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Subbag PEP agar disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- Bidang PKP diminta untuk aktif memperoleh dan mengelola informasi terkait kawasan Tanjung Carat.
- Pada Tahun 2025 diperlukan data capaian RTLH dari 17 kabupaten/kota, meliputi jumlah RTLH, realisasi penanganan, serta persentase capaian di masing-masing daerah.
- Setiap kegiatan kerja sama harus memiliki keterikatan resmi dengan pihak ketiga melalui MoU yang memuat ruang lingkup kerja sama dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Jafung Api Ahli Madya

- Dalam pelaksanaan pembangunan, disepakati perlunya dilakukan pemetaan lokasi kegiatan per tahun yang dimulai sejak Tahun 2025 dan seterusnya. Pemetaan ini mencakup seluruh 17 kabupaten/kota untuk menentukan kabupaten/kota yang menjadi prioritas dan diinterpretasikan dalam perencanaan program;
- Disampaikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas pada tahun berjalan agar dilakukan secara seragam di seluruh bidang, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, guna menjamin keadilan dan efisiensi anggaran;
- Kegiatan yang direncanakan untuk Tahun 2027 diharapkan telah terakomodir seluruhnya dalam perencanaan anggaran agar dapat menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Untuk sementara, diminta agar disiapkan wadah atau rumah kegiatan sebagai bahan awal yang nantinya akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Untuk Subbag PEP agar dapat melakukan pemantauan terhadap rencana kerja Bidang PKP untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengurangan dan penanganan kawasan kumuh, serta memastikan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;
- Terkait permasalahan kawasan kumuh di Kota Palembang, dibahas perlunya penegasan dan pengelompokan (klasterisasi) kawasan kumuh secara jelas. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Provinsi memperoleh kejelasan dan pemahaman yang menyeluruh dalam perencanaan serta penanganan kawasan kumuh di Kota Palembang;
- Kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 namun terhapus agar dapat diusulkan kembali untuk dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027, dengan tetap

memperhatikan parameter perhitungan anggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah.

Bidang PKP

- Disampaikan bahwa seluruh kegiatan Bidang PKP pada Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat sisa pekerjaan fisik sekitar 5% yang belum dapat ditagihkan. Berdasarkan instruksi dari BPKAD, sisa pekerjaan tersebut tidak dapat ditagihkan seluruhnya.
- Untuk Tahun Anggaran 2026, Bidang PKP menyatakan kesiapan untuk melaksanakan proses lelang. Sebanyak tujuh kegiatan fisik telah disiapkan, lengkap dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing.
- Terkait kegiatan yang dilaksanakan bersama Bidang AMPL, telah dilakukan pembahasan bersama dan direncanakan terdapat tiga kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, masih ditemui kendala di lapangan. Oleh karena itu, kelengkapan bukti dan dokumen pendukung akan dipercepat penyusunannya untuk segera dilakukan proses verifikasi.
- Disampaikan pula bahwa beberapa kegiatan AMPL yang menggabungkan pendanaan dari APBN mengalami kendala, khususnya karena kebutuhan Sambungan Rumah (SR) dalam jumlah yang cukup besar.
- Untuk Tahun Anggaran 2027, pola penanganan kawasan kumuh oleh Bidang PKP terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pemugaran dan peningkatan. Namun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Bidang PKP hanya dapat melaksanakan kegiatan pemugaran.
- Bidang PKP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pendataan kawasan kumuh melalui Sistem Digitalisasi Informasi Permukiman Kumuh (SiPerkum) pada satu wilayah, yaitu Kabupaten Banyuasin. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa data yang belum lengkap dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua kriteria, yaitu pembangunan baru dan perbaikan. Bidang PKP telah menyusun Buku Kas Umum (BKU). Untuk keseragaman nomenklatur, disepakati agar menggunakan nomenklatur Pembangunan Rumah Layak Huni.
- Ditekankan bahwa seluruh kegiatan pemugaran wajib dilaksanakan dengan penatausahaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Terkait kegiatan di Desa Bailangu, disampaikan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan kumuh dan direncanakan akan dilaksanakan pembangunan baru. Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan disiapkan oleh masyarakat setempat. Pemilihan Desa Bailangu didasarkan pada potensi desa yang kreatif, rencana pembenahan kawasan, serta kebutuhan sarana pendukung berupa masjid dan taman lingkungan.
- Bidang PKP juga akan melakukan pendataan rumah baru di Kabupaten Banyuasin serta melaksanakan survei ke kabupaten/kota lain yang memiliki kawasan kumuh.
- Untuk kegiatan fisik penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Musi Rawas Utara, telah tersedia Detail Engineering Design (DED). Sementara itu, lokasi daerah lainnya telah disampaikan dalam bahan paparan.
- Total pagu usulan Bidang PKP untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp37.653.171.000, yang telah mencakup kegiatan pengawasan, pelaksanaan fisik, dan perencanaan teknis.
- Disampaikan bahwa hingga saat ini penanganan kawasan kumuh di Kota Palembang belum dapat diinterpretasikan karena belum adanya informasi dan dukungan data yang diperlukan dari pemerintah setempat.
- Untuk pelaksanaan program RTLH Tahun Anggaran 2027, ditekankan agar pembagian kegiatan dilakukan secara adil bagi seluruh kabupaten/kota. Apabila program RTLH pada 17

kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun berikutnya, Bidang PKP akan melakukan survei dan pemeriksaan langsung ke masing-masing kabupaten/kota.

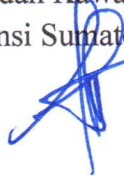
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan telah menerima usulan Rencana Kerja (Renja) Bidang PKP untuk Tahun Anggaran 2027. Seluruh kegiatan yang direncanakan pada tahun tersebut diharapkan dapat masuk ke dalam RKPD. Terkait dengan penetapan pagu Program Bidang PKP, agar tetap berpedoman pada RENSTRA sehingga tidak mengalami kendala dalam proses penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Dibahas pula kesesuaian pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang perlu disesuaikan dengan pagu dan acuan perhitungan yang berlaku. Terkait kegiatan kerja sama, Bidang PKP diharapkan telah menyiapkan rencana kerja sama yang jelas, termasuk dengan pihak mana kerja sama dilakukan serta dasar atau acuan kerja sama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pihak terkait lainnya.
- Keterkaitan antara RPJMD dan RENSTRA dalam Program Kawasan Kumuh Bidang PKP menjadi perhatian, khususnya dalam mendukung Perjanjian Kinerja Eselon II. Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang PKP diharapkan dapat mengisi capaian kinerja, baik untuk Tahun 2025 maupun tahun berjalan berikutnya, dalam bentuk persentase capaian.
- Selain itu, Bidang PKP diminta untuk menyampaikan data terkait tenaga kerja yang terserap serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2025 agar dapat segera dilaporkan kepada Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- Program Penanganan Kawasan Kumuh Bidang PKP juga disampaikan mendukung tema penanggulangan kemiskinan, Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah, serta PSG. Oleh karena itu, program tersebut diharapkan dapat terus dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026 dan tahun-tahun selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya :

Yang Mengetahui,

Pimpinan Rapat:
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir.H. Novian Aswardani, ST.,M.M., IPM., ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

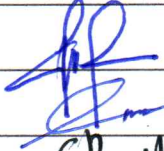
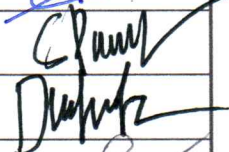
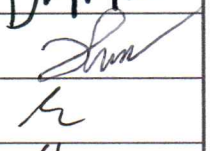
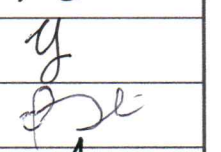
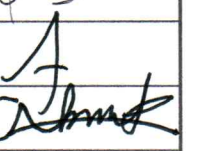
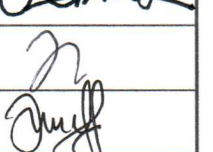
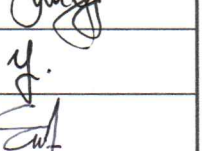
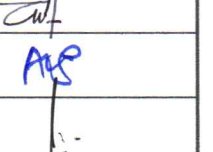
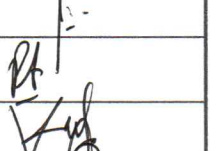
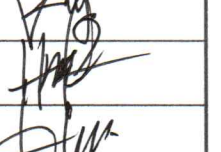
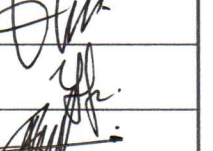
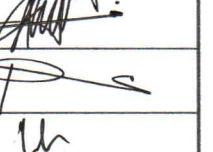
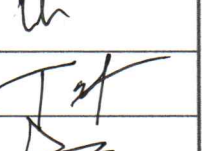
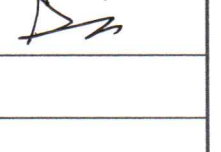
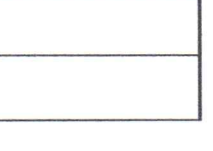
**Dokumentasi Rapat Usulan Kegiatan TA 2027 Bidang PKP
Tanggal 12 Januari 2026**





ABSENSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HARI : SENIN
TANGGAL : 12 JANUARI 2026
KEGIATAN : PAPARAN RANWAL RENJA TA 2027 BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NOVIAN ASWARDANI	L	DISPERKIM	KEPALA DINAS	
2	YUDHO JOKO PRASTYO	L	Disperkim	sek Dir	
3	H.M. Genen Har	L	Dusun	Jarang Pr	
4	H. Deden Pulpa	L	"	Kasi	
5	Erisa Susanti	P	Disperkim	Ksb. PEP	
6	A. hendi Kurnawan, ST	L	Kapred	Kasubed	
7	Maya Septream	P	Kapred	Staf	
8	Rafly Devi	P	Disperkim	Kasi PKP	
9	A. hendi Wanda	L	PKP	Manajemen	
10	Abdan Sakha Syakura	L	PKP	staf	
11	Dewi Afriani	P	Disperkim	Staf PKP	
12	Winda Yulianti	P	Disperkim	Staf	
13	MARIYATI	P	"	STAF PKP	
14	EKA-SURYA L	L	Disperkim	STAF PKP	
15	Aivita Cindy Wjaya	P	Disperkim	staf PEP	
16	Yudo. H	L	PEP	Staf	
17	Renni Dwi A	P	PEP	Staf	
18	Visca Maharani	P	Disperkim	Staf	
19	Imman Soemantri	L	"	PKP	
20	Fera Asti Kesuma	P	Disperkim	- - -	
21	Andini Febriyanti	P	Disperkim	PKP	
22	Agustini	P	Staf PEP	Staf	
23	M. Nis Pm	L	- - -	Staf	
24	Nur Atika W	P	- - -	Staf	
25	FIRLY	P	PKP	staf	
26	Chandra	L	PEP	Staf	
27					
28					
29					

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10
Telp. 3351854 Palembang

NOTULEN RAPAT

Pada hari Senin tanggal 12 bulan Januari tahun 2026 jam : 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Basemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

1. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Materi Rapat : Pembahasan Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027
3. Peserta Rapat :
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala Bidang Perumahan
 - Kepala Seksi Penyiapan Data Perumahan
 - Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pelaksana Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4. Hasil / Kesimpulan Rapat :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Bidang Perumahan diminta untuk memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan RPJMD Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Terkait Program Perumahan, kegiatan pendataan kebencanaan termasuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga perlu tetap dianggarkan;
- Dibahas bahwa kegiatan penanganan sebelum dan sesudah bencana yang belum tertangani diharapkan dapat berjalan melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur terkait kebencanaan. Namun demikian, disampaikan pula bahwa penganggaran untuk mendukung SPM kebencanaan berpotensi tidak terserap apabila tidak terjadi bencana, sehingga anggaran tersebut dinilai menjadi kurang optimal;
- Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pembahasan apakah selain pendataan kebencanaan terdapat kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Permasalahan ini diharapkan dapat dikoordinasikan kembali dengan pemerintah pusat, mengingat kegiatan kebencanaan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terjadi bencana, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat digunakan atau terserap. Sebagai alternatif, diusulkan agar kegiatan dapat diarahkan dalam bentuk pemberian donasi kepada Masyarakat;
- Bidang Perumahan juga diminta untuk selalu aktif dalam penyampaian dan penyerapan laporan. Selain itu, disampaikan perlunya pemutakhiran data backlog perumahan di 17 kabupaten/kota;
- Terkait tugas pelaksanaan Surat Keputusan Tiga Menteri serta pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), disampaikan perlunya dilakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota. Diperlukan pula finalisasi data terkait jumlah PBG dan BPHTB yang telah diterbitkan sebagai tindak lanjut SK Tiga Menteri;
- Selanjutnya untuk bidang Perumahan diminta agar dibuat surat permohonan data existing terkait pelaksanaan SK Tiga Menteri kepada pemerintah kabupaten/kota, serta meminta data kepada pemerintah desa terkait BPHTB;
- Untuk Tahun Anggaran 2026, diharapkan seluruh kegiatan dapat tetap dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Jafung Api Ahli Madya

- Disampaikan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan potensi penanganan kawasan harus memiliki pengusul yang jelas, khususnya untuk wilayah permukiman masyarakat yang berada di pinggiran atau bantaran sungai. Kejelasan pengusul diperlukan sebagai dasar perencanaan, penentuan kewenangan, dan tindak lanjut program.
- Pengumpulan data terkait lokasi dan kondisi kawasan harus dilakukan secara jelas, lengkap, dan terverifikasi agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- Terkait kebencanaan di Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan bahwa jenis bencana yang perlu menjadi perhatian antara lain angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor, sehingga diperlukan kesiapsiagaan serta pendataan yang akurat untuk mendukung perencanaan penanganan ke depan.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Bidang Perumahan diminta untuk melakukan pendataan sebagai bahan laporan terkait kejadian bencana dan kegiatan relokasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kepada pimpinan;
- Terkait pelaksanaan kegiatan KI, disampaikan bahwa diperlukan tindakan tertentu berupa keterlibatan langsung ke lokasi yang akan dilakukan survei. Kehadiran langsung di lapangan diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan survei serta mendukung kegiatan lainnya agar berjalan secara optimal.

Bidang Perumahan

- Disampaikan bahwa Bidang Perumahan melaksanakan dua program utama, yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Kedua program tersebut mendukung target rencana Dinas, yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, serta terpenuhinya akses hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan;
- Terkait dengan usulan pagu anggaran Program Bidang Perumahan, disampaikan bahwa Program Pengembangan Perumahan diusulkan dengan pagu sebesar Rp1.870.000.000. Sementara itu, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diusulkan dengan pagu sebesar Rp51.645.000.000. Rincian lebih lanjut dari masing-masing program disampaikan sebagaimana terlampir dalam bahan paparan.

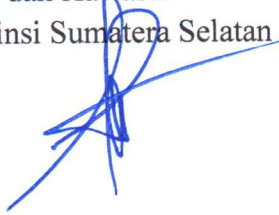
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) telah menerima usulan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, untuk subkegiatan yang ada di Bidang Perumahan agar menyesuaikan dengan nomenklatur terbaru yang tersedia dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Terkait kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), disampaikan bahwa pagu anggarannya akan menjadi perhatian dan pemantauan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, diharapkan kegiatan yang menunjang SPM agar disusun secara tepat sehingga tidak mengalami refocusing atau pemotongan anggaran;
- Dalam proses penginputan ke dalam SIPD, disampaikan bahwa perincian kegiatan perlu dilakukan secara detail, antara lain mencantumkan jumlah dan jenis belanja seperti pembelian alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan lainnya dalam satu bidang atau kegiatan, agar perencanaan dan penganggaran lebih jelas dan akuntabel.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya :

Yang Mengetahui,

Pimpinan Rapat:
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



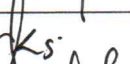
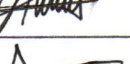
Ir.H. Novian Aswardani, ST.,M.M., IPM., ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

**Dokumentasi Rapat Usulan Kegiatan TA 2027 Bidang Perumahan
Tanggal 12 Januari 2026**



ABSENSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HARI : SENIN
TANGGAL : 12 JANUARI 2026
KEGIATAN : PAPARAN RANWAL RENJA TA 2027 BIDANG PERUMAHAN

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. H. Novian A	L	DisPerkim	Kadis	
2	ZULKarnaen	L	DISPerkim	KABID perumahan	
3	H. Yudho Joko P		DisPerkim	Sekretaris	
4	H.M. Senen Har		DisPerkim	Jafung RT	
5	At Hadi Kurnawan, ST	L	Bappeka	Kesugid	
6	Maya Septorani	P	Bappeka	Staf	
7	Erisa Susanti		DisPerkim	Ksb. PEP	
8	Egnia Syclza	P	DisPerkim	Stat Perumahan	
9	Jihan Maharani	P	-//-	-//-	
10	NISRIN NAZHIFA	P	-//-	-//-	
11	M. Fadli Wardhana	L	DisPerkim	Stat Perumahan	
12	Masayu Diana	P	-//-	Stat Perumahan	
13	KURNIAWAN	L	DISPERKIM	-//-	
14	Frico B. Sudarja	L	DisPerkim	Stat Perumahan	
15	Gandhi Indra P	L	DisPerkim	-//-	
16	Hermawita	P	"	"	
17	Yudo. H	L	PEP	Stat	
18	M. Akhyannudat				
19	Fera Aski Kesuma	P	DisPerkim	Stat perumahan	
20	Alvita Cindy Wsawo	P	PEP	Stat	
21	Benni Dwi A	P	PEP	Stat	
22	Neny TRIBUANA	P	DISPERKIM	PERUMAHAN	
23	M. May Rana P	L	DisPerkim	PEP	
24	Agustini	P	PEP	Staf	
25	Chandra .s	L	P	Staf	
26					
27					
28					
29					

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang, Sumatera Selatan
Telp. 321977, 317837 Fax. 321977

NOTULEN RAPAT

Pada hari Selasa tanggal 13 bulan Januari tahun 2026 jam : 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Basemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

1. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Materi Rapat : Pembahasan Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027
3. Peserta Rapat :
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala Bidang PBL
 - Kepala Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Penataan Bangunan Dan Lingkungan
 - Kepala Seksi Penataan Bangunan
 - Kepala Seksi Penataan Lingkungan Kawasan
 - Staf Bidang PBL
 - Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pelaksana Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4. Hasil / Kesimpulan Rapat :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Kegiatan yang akan dilaksanakan harus linear dengan RPJMD yang sudah ditetapkan;
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan Aplikasi sireng, untuk menerbitkan 59 sertifikat pada tahun 2025;
- Pembuatan brosur berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap sertifikasi pengembang, fungsi terhadap sertifikasi berjalan;
- Berdasarkan dari Asosiasi pengembang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 500 developer pengembang yang memiliki sertifikasi menengah di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan sudah menerbitkan 59 sertifikat, sisanya akan diterbitkan pada tahun 2026;
- Lakukan permintaan data dokumen cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan, jika memang belum ada koordinasi terkait, walaupun cagar budayanya masuk dalam Pemerintah Kabupaten/Kota, tetap dimasukkan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cari data terkini terkait cagar budaya dan hal apa saja yang harus dilakukan untuk penetapan gedung;
- Diharapkan untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholder cagar budaya karena Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu Provinsi yang cukup terkenal;
- Terkait output yang dikoordinasikan ke balai harus sama dengan apa yang akan disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan;
- Buat rekap permintaan seluruh pengelola teknis, mana saja yang sudah terbantu karena hal tersebut yang akan menjadi kinerja dinas;
- Sinkronisasikan data antar bidang, seluruh data dikoordinasikan dengan Perencanaan terlebih dahulu.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Sesuaikan kegiatan dengan nomenklatur baru;
- Terkait permintaan analisa bangunan gedung dicoba untuk diakumulasikan.

Jafung API Ahli Madya

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengurus bangunan, mendata bangunan yang diperkirakan sebagai peninggalan budaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pengelola teknis yang dimana apabila ada yang mengajukan rehabilitasi dan masuk dalam data aset Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberi saran dan masukan karena nilai bangunan tidak bisa dibongkar habis, karena hal tersebut berdasarkan peninggalan sejarah dan bagaimana nantinya cara untuk mengamankan bangunan yang akan dilakukan rehabilitasi.

Bidang PBL

- Total Pagu 8,4 Milyar dengan 3 program kegiatan;
- Target keseluruhan pengembang ada 500 pengembang, untuk target indikator persentase tidak bisa tinggi karena masih ada kendala;
- Pengelolaan rumah negara merupakan rumah golongan 3 dan setiap tahun mencapai 5-10 rumah negara yang dikelola sehingga untuk targetnya diambil 5 rumah negara;
- Kegiatan dimulai pada tahun 2026, terkait cagar budaya sudah dikoordinasikan dengan melakukan identifikasi awal dan mencari tau apa saja yang dikerjakan oleh provinsi;
- Di tahun 2026 dilakukan kajian awal dan pada tahun 2027 baru dilaksanakan kegiatan;
- Bisa dilakukannya rehabilitasi, pemugaran insentif dan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan cagar budaya;
- Terkait identifikasi cagar budaya hanya sampai rekomendasi saja dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

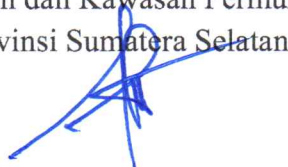
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Terdapat kendala di satuan yang ada pada nomenklatur yang ditetapkan, ada perbedaan di Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait data yang ada;
- Skema pada tahun ini berbeda, Bappeda meminta titik lokasi yang detail, apabila sudah membuka sub kegiatan, maka diharuskan untuk mencantumkan titik lokasi;
- Terkait permintaan data LPPD tentang indikator sertifikasi, agar pada tahun 2027 kegiatan sertifikasi untuk tidak dihapuskan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya :

Yang Mengetahui,

Pimpinan Rapat:
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir.H. Novian Aswardani, ST.,M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004

Dokumentasi Rapat Usulan Kegiatan TA 2027 Bidang PBL
Tanggal 13 Januari 2026





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang, Sumatera Selatan

Email : subbagperencanaan.pucksumsel@gmail.com

Telp. 321977, 317837 Fax. 321977

NOTULEN RAPAT

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2026 jam : 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Basemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

1. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Materi Rapat : Pembahasan Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027
3. Peserta Rapat :
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jasa Konstruksi
 - Kepala Seksi Jasa Konstruksi UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jakon
 - Kepala Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jakon
 - Staf Bidang UPTD
 - Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Pelaksana Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4. Hasil / Kesimpulan Rapat :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Diharapkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk dilakukan di kantor saja;
- Terkait Optimalisasi BLUD yang sudah ditetapkan, untuk mengupgrade alat baru, sosialisasi, iklan, dan mempersiapkan bahan;
- Berkaitan dengan aset gedung yang dipakai dalam Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan dan Jakon, untuk di tindaklanjuti apakah perlu dibuat surat gubernur yang ditujukan ke Menteri Pekerjaan Umum dan diteruskan ke balai;
- Ada rencana pelantikan forum jasa konstruksi;
- Terkait 14 IKK LPPD dimohon untuk jadi perhatian;
- Untuk diperhatikan lapangan parkir dan bangunan yang sudah tidak berfungsi lagi.

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Terkait penggunaan videotron bisa dipromosikan kepada para pengembang.

UPTD PIP2B

- UU NO 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menjelaskan terkait sertifikasi kompetensi kerja;
- Terkait jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi, target jumlah 250 dan sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 280;
- Paket terkait jasa konstruksi dibawah 400 milyar
- Total per tahun (250 orang)

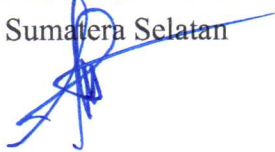
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Untuk target indikator jasa konstruksi harus sesuai dengan Renstra dan indikator jasa konstruksi termasuk dalam pembuktian LPPD serta diharapkan dapat melengkapi data pendukung LPPD yang diminta;
- Terkait pelayanan BLUD dan BMD berada di program rutin, sementara PPTK ada di UPTD PIP2B akan tetapi di cascading penempatan BLUD ada di sekretariat dan dibawah kasubag keuangan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya :

Yang Mengetahui,

Pimpinan Rapat:
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir.H. Novian Aswardani, ST.,M.M., IPM., ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

**Dokumentasi Rapat Usulan Kegiatan TA 2027 UPTD PIP2B & Jakon
Tanggal 13 Januari 2026**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang, Sumatera Selatan
Email : subbagperencanaan.pucksumsel@gmail.com
Telp. 321977, 317837 Fax. 321977

NOTULEN RAPAT

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2026 jam : 13.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Basemah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

1. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Materi Rapat : Pembahasan Paparan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2027
3. Peserta Rapat :

- Sekretaris Dinas
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Subbagian Keuangan
- Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Staf Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

4. Hasil / Kesimpulan Rapat :

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Sewa doublecabin untuk pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- Terkait fasilitasi kunjungan tamu dari yang sebelumnya 30 menjadi 100;
- Menyiapkan souvenir untuk kunjungan tamu, seperti plakat;
- Buat TOR/KAK untuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kebutuhan kendaraan dll, tampilkan tahun dan keadaan, apakah masih bisa dipakai/rusak;
- Pengadaan soundsystem yang memadai untuk acara-acara outdoor;
- Buat manajemen aset di setiap bidang dan sekretariat;

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

- Pembuatan seragam untuk setiap kepala bidang maupun kepala seksi yang ada di dinas.

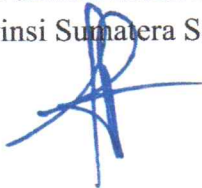
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Penyediaan jasa surat menyurat, untuk materai dan SPPD dinaikkan juga dari 18 juta;
- Untuk kegiatan rutin, jika untuk pembelian kendaraan disiapkan anggarannya, apabila tidak ada pembelian kendaraan maka akan digeser ke kegiatan yang lain;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu ada nomenklatur tersendiri;
- Rencana kebutuhan, merapikan usulan kebutuhan dinas, menganggarkan pembelian barang.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya :

Yang Mengetahui,

Pimpinan Rapat:
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir.H. Novian Aswardani, ST.,M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

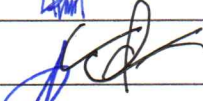
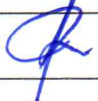
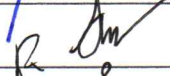
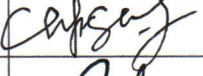
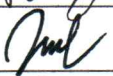
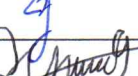
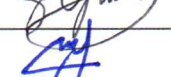
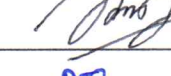
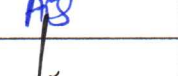
NIP. 197511251999031004

**Dokumentasi Rapat Usulan Kegiatan TA 2027 Sekretariat
Tanggal 13 Januari 2026**



ABSENSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HARI : SELASA
TANGGAL : 13 JANUARI 2026
KEGIATAN : PAPARAN RANWAL RENJA TA 2027 BIDANG PBL, SEKRETARIAT, UPTD PIP2B DAN JAKON

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NOVIAN ASWARDANI	L	DISPERKIM	KEPALA DINAS	
2	YUDHO	L	DISPERKIM	SEKDIS	
3	M. Agus Alhams	L	Disperkim	Kepd Pbl	
4	H. M. SEVEN HAR	L	M	JAKONG	
5	Fajri Ansa	L	Disperkim	Kasubag. Umum	
6	Erisa Susanti	P	- / -	Kasubag PEP	
7	Ir. Muallimah Gusni. ST. M. Si	P	UPTD PIP2B dan Jakon	Kepala UPTD	
8	Maulida Justisia	P		Kab. Kew	
9	Ar Hadi Kurnawan. ST	L	Kepsek	Kepubad	
10	Marga Septisari	P	Kepsek	Staf	
11	Budi Indah Hapsari	P	UPTD PIP2B & Jakon	Kasi Jakon	
12	Muhammad Syazari	L	UPTD PIP2B & Jakon	Kasi PIP2B	
13	Eva G	L	Disperkim	Kori PP Pbl	
14	Annisa Fitriyan, SE	P	sekretariat	Staf	
15	Galih Bonar	L	DISPERKIM	STAF Subkeuangan	
16	Angga S.G	L	PBL	Kasi PL	
17	A. Zulkarnain	L	- / -	Kasi PB	
18	Aurita Cindy Wibaya	P	PEP	Staf	
19	Yudo. H.	L	Staf PEP	Staf	
20	Renni Dwi A	P	Staf PEP	Staf	
21	Bayu Prihadi SE	L	Sekretariat	Staf	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

NO.	NAMA	L/P	BIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					